

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DALAM OPTIMALISASI PROGRAM PRIORITAS: STUDI EVALUATIF BELANJA PUBLIK DI KABUPATEN FLORES TIMUR

Veronika Boleng Kelen

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

*Corresponding Author:

veronikakelen5@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the critical role of fiscal policy effectiveness in optimizing regional budget utilization to support priority development programs in East Flores Regency. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of the fiscal policy implemented by the East Flores Regency Government in directing public expenditure, particularly capital expenditure and indirect expenditure, to achieve the strategic development goals amid fiscal constraints. The study employs a qualitative descriptive approach, utilizing secondary data analysis and in-depth interviews with relevant stakeholders. The findings reveal that although there is alignment between fiscal policy and development priorities, the implementation faces challenges such as suboptimal allocation efficiency and program overlap. This study recommends strengthening performance-based planning and reforming local fiscal management to enhance the effectiveness of regional budget management.

Keywords: fiscal policy, public expenditure, priority programs, budget management

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional karena diyakini mampu mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Annisa, 2015). Kebijakan fiskal dalam hal ini memegang peranan penting karena dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengelolaan belanja publik yang efisien dan produktif (Ma'ruf & Andriansyah, 2022).

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi menjadi instrumen penting untuk memastikan stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran ini terlihat dalam berbagai strategi fiskal, seperti peningkatan belanja sosial dan investasi publik (Dinarjito & Dharmazi, 2020). Dalam upaya menciptakan kesehatan fiskal, dua langkah strategis menjadi penting: pertama, menurunkan defisit APBN secara bertahap menuju keseimbangan atau surplus; dan kedua, menurunkan jumlah stok utang publik serta rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan indikator utama stabilitas fiskal jangka panjang (Putra, Mukhlis, & Utomo, 2017).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat erat kaitannya dengan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran (Sumardjoko, 2019). Kebijakan fiskal daerah meliputi pengelolaan pendapatan asli daerah, dana transfer dari pusat, serta pengelolaan belanja daerah yang semuanya diatur dalam kerangka APBD. Pada sisi penerimaan, kebijakan yang diambil antara lain terkait optimalisasi pajak daerah dan pemanfaatan dana bagi hasil pajak antara pusat dan daerah. Penerimaan pajak daerah di Indonesia

memang berbeda-beda antar daerah, tergantung pada kapasitas fiskal dan potensi ekonomi masing-masing wilayah (Sumardjoko, 2019). Bahkan, dalam satu daerah yang sama, penerimaan pajak daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (Pale, 2022).

Kebijakan fiskal adalah bagian penting dari manajemen pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sevianti, Darmawati, Arkaan, & Yulianto, 2025). Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengawasi kebijakan fiskal, yang mencakup perpajakan dan pengeluaran pemerintah (Aji & Wijayanti, 2023). Kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak untuk mendorong perekonomian pada saat resesi dan tingkat kemiskinan tinggi, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah untuk memperlambat perekonomian (Sevianti et al., 2025). Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, kebijakan moneter dan fiskal harus bekerja sama untuk mencapai defisit fiskal dan sasaran moneter secara konsisten (Aji & Wijayanti, 2023). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai (Sevianti et al., 2025).

Kebijakan fiskal pemerintah daerah pada dasarnya juga menggunakan dua instrumen utama yakni pemungutan pajak guna mendanai anggaran daerah dan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam bentuk berbagai komponen pengeluaran. Kebijakan fiskal pemerintah daerah di Indonesia tercermin dari struktur APBD daerah yang bersangkutan. Secara umum struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sedangkan Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Terakhir, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pale, 2022).

Efektivitas kebijakan fiskal di daerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang tersedia, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan direalisasikan untuk program-program prioritas (Pale, 2022). Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi, di mana lebih dari 85% pendapatan daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat lainnya. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran, terutama dalam mengarahkan belanja ke sektor-sektor strategis yang mendukung prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Santoso & Wibowo, 2023). Data APBD menunjukkan bahwa struktur anggaran masih didominasi oleh belanja tidak langsung, yang membatasi fleksibilitas fiskal dalam mendanai belanja modal dan program prioritas. Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sumber penerimaan dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. PAD dapat diperoleh dengan meningkatkan pendapatan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lainnya yang merupakan PAD yang sah dan diakui (Putra & Sari, 2021). Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya.

Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengarahkan belanja publik agar mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pale, 2022). Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah (Putra & Sari, 2021). Keberhasilan otonomi daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintah (Santoso & Wibowo, 2023). Namun, efektivitas tersebut seringkali menghadapi kendala struktural seperti dominasi belanja rutin, rendahnya kapasitas fiskal lokal, dan lemahnya sistem evaluasi kinerja anggaran (Putra & Sari, 2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari kajian terdahulu yang menitikberatkan pada strategi pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah (Kelen, 2024). Kajian ini memperluas ruang lingkup analisis dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal secara menyeluruh, terutama dalam konteks alokasi dan pelaksanaan belanja publik di Kabupaten Flores Timur.

Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana prioritas anggaran telah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah serta bagaimana efektivitas capaian output dari belanja publik dapat ditingkatkan melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang lebih responsif dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Penentuan informan penelitian ini, peneliti menentukan beberapa narasumber atau informan yang dianggap lebih paham tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik Purposive Sampling. Karena dengan pertimbangan informan sumber data dalam penelitian ini oleh peneliti dianggap lebih paham dengan konteks penelitian (Sugiyono, 2021:94). Selanjutnya analisis data yang diperoleh melalui dokumentasi laporan APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2017–2025, wawancara dengan pejabat Bappeda, serta analisis RPJMD dan Renstra OPD. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kebijakan Fiskal Kabupaten Flores Timur

Kebijakan fiskal daerah merupakan instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Menurut teori kebijakan fiskal daerah, pengelolaan anggaran yang proporsional dan terarah pada program prioritas merupakan kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ariyanti, 2023). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya fiskal, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer, guna mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah (Kemenkeu, 2023).

Secara formal, kebijakan fiskal di Kabupaten Flores Timur diatur dan diarahkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017–2022, yang menetapkan lima sektor prioritas pembangunan, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pariwisata, dan perikanan. Visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD menekankan terciptanya Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing, dengan misi strategis yang mencakup penyelamatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sektor ekonomi unggulan.

Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan Kepala Bidang Pembangunan Daerah di Bappelitbangda Kabupaten Flores Timur, realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya ketidakseimbangan signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran fiskal. Lebih dari 60% APBD dialokasikan untuk belanja tidak langsung, terutama belanja pegawai, sehingga alokasi untuk belanja langsung yang mendukung sektor prioritas menjadi sangat terbatas. Kepala Bidang Pembangunan menyampaikan bahwa dominasi belanja pegawai ini menjadi kendala utama dalam optimalisasi penggunaan anggaran untuk sektor strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran fiskal yang berdampak pada keterbatasan fleksibilitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan sektor prioritas. Pengelolaan anggaran yang masih didominasi oleh belanja tidak langsung menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menyalurkan dana secara optimal untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menuntut perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran, termasuk peningkatan kapasitas aparat daerah dalam evaluasi dan pengawasan

anggaran agar alokasi belanja dapat lebih proporsional dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Kelen (2024) yang menyoroti strategi pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah. Kelen mengemukakan bahwa ketergantungan tinggi pada transfer pusat dan belum optimalnya pemanfaatan potensi PAD menjadi faktor penghambat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, intensifikasi dan diversifikasi sumber PAD menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Program Prioritas

Menurut teori kebijakan fiskal daerah, efektivitas pengelolaan anggaran publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja yang tepat sasaran, efisien, dan akuntabel untuk mendukung program prioritas pembangunan (Ariyanti, 2023). Perencanaan anggaran berbasis kinerja menjadi salah satu pendekatan penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menghasilkan output dan outcome yang terukur sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Namun, hasil penelitian di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa struktur belanja publik masih didominasi oleh belanja tidak langsung, dengan porsi belanja pegawai mencapai lebih dari 60% dari total APBD. Meskipun terdapat peningkatan belanja modal hingga 64,98% pada perubahan APBD tahun 2023, efisiensi pelaksanaan program masih rendah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, ditemukan adanya tumpang tindih program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kurangnya indikator kinerja yang jelas untuk mengukur pencapaian hasil program. Hal ini sejalan dengan teori yang menekankan pentingnya indikator kinerja sebagai alat ukur efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Program prioritas yang tercantum dalam RPJMD, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi anggaran tahunan. Sebagian besar anggaran masih terserap untuk aktivitas administratif dan belanja rutin, sehingga membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program strategis dan pelayanan publik dasar secara optimal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan daerah, pada bagian berikut disajikan Tabel 1 yang memuat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023–2024 sebagai salah satu indikator kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas.

Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2024

Sumber PAD	Target 2024 (Rp)	Realisasi s.d. Sept 2024 (Rp)	Persentase (%)
Pajak Daerah	8.000.000.000	2.000.000.000	25,00
Retribusi Daerah	5.500.000.000	3.000.000.000	54,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.500.000.000	300.000.000	20,00
Lain-lain PAD	34.000.000.000	5.750.000.000	16,91
Total PAD	49.000.000.000	11.050.000.000	22,55

Sumber: Bapenda Flores Timur, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pembiayaan belanja daerah masih tergolong rendah, dengan realisasi hanya 22,55% dari target. Idealnya, sesuai

prinsip kemandirian fiskal, daerah seharusnya mampu memobilisasi sumber daya fiskal lokal untuk mendukung pembangunan daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan kelembagaan pajak daerah dan insentif fiskal yang mendorong kepatuhan dan perluasan basis pajak.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai alokasi anggaran yang diarahkan pada program prioritas di Kabupaten Flores Timur, berikut disajikan Tabel 2 yang memuat data Alokasi Anggaran Belanja Prioritas Tahun Anggaran 2023. Tabel ini menunjukkan proporsi dan distribusi anggaran pada sektor-sektor utama sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja Prioritas Flores Timur 2023

Sektor Prioritas	Anggaran (Rp)	Persentase dari Total APBD (%)
Pendidikan	120.000.000.000	16,5
Kesehatan	95.000.000.000	13,0
Infrastruktur Dasar	110.000.000.000	15,1
Pariwisata	30.000.000.000	4,1
Perikanan	25.000.000.000	3,4
Total Belanja Prioritas	380.000.000.000	52,1

Sumber: APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2, alokasi anggaran belanja pada sektor prioritas mencapai lebih dari 50% dari total APBD. Secara teoritis, belanja publik yang diarahkan pada sektor produktif dan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas produktif masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja anggaran. Dengan demikian, tidak hanya kuantitas belanja yang menjadi tolok ukur efektivitas fiskal, tetapi juga sejauh mana output dan outcomenya tercapai secara terukur dan akuntabel.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan fiskal dan implementasi anggaran, yang berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan perencanaan berbasis kinerja dan peningkatan kapasitas manajemen anggaran menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal di Kabupaten Flores Timur.

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Fiskal

Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal, kemandirian fiskal daerah merupakan aspek krusial yang menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara mandiri untuk membiayai pembangunan lokal (Oates, 1999; Musgrave, 1959). Kemandirian fiskal yang rendah seringkali menyebabkan ketergantungan berlebihan pada transfer pusat, yang dapat membatasi fleksibilitas dan efektivitas kebijakan fiskal daerah (Bird & Smart, 2002). Selain itu, teori pengelolaan keuangan publik menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik untuk mencegah maladministrasi dan korupsi yang dapat menghambat efektivitas penggunaan anggaran (World Bank, 2001).

Berdasarkan data terbaru, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sebesar Rp49 miliar, namun hingga September 2024 realisasinya baru mencapai sekitar Rp10 miliar atau 20,49% dari target (FloresPos.net, 2024). Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat dan lemahnya kemandirian fiskal daerah, yang menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan fiskal yang efektif. Rendahnya realisasi PAD juga disebabkan oleh belum ditetapkannya sejumlah peraturan daerah yang mengatur penagihan pajak dan retribusi, sehingga menghambat optimalisasi penerimaan daerah.

Selain itu, audit massal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Flores Timur pada Desember 2024 terhadap 559 unit kerja, termasuk desa, sekolah, dan puskesmas, menemukan indikasi korupsi di satu desa dan maladministrasi di puluhan kantor dinas, khususnya dalam pengelolaan akuntansi keuangan (MetroTVNews, 2024). Temuan ini mengindikasikan adanya permasalahan tata kelola keuangan yang dapat menurunkan efektivitas penggunaan anggaran dan menimbulkan risiko penyalahgunaan dana publik.

Dalam hal pengajuan anggaran, Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengusulkan anggaran mendahului perubahan APBD 2025 sebesar Rp69 miliar yang bersumber dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya. Namun, proses pengajuan ini mengalami keterlambatan akibat kendala teknis dalam penginputan hasil efisiensi dan pergeseran anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (FloresPos.net, 2025). Keterlambatan ini berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan program prioritas dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada perubahan APBD 2023, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menambahkan belanja daerah sebesar Rp66,7 miliar, termasuk penambahan belanja modal sebesar 64,98% (MasarikuOnline, 2023). Meskipun penambahan ini menunjukkan upaya peningkatan investasi daerah, hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait prioritas pengeluaran dan efektivitas penggunaan anggaran. Penambahan anggaran yang signifikan tidak selalu menjamin peningkatan kinerja jika tidak diikuti dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat.

Secara keseluruhan, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal di Kabupaten Flores Timur masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi kemandirian fiskal, tata kelola keuangan, maupun kapasitas administrasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengelolaan fiskal yang menyeluruh, termasuk penguatan regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas teknis aparat daerah agar kebijakan fiskal dapat berjalan optimal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah diarahkan secara konsisten pada program prioritas pembangunan, namun efektivitas pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala. Dominasi belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai, efisiensi pelaksanaan yang rendah, serta kapasitas fiskal daerah yang belum optimal menjadi faktor utama yang membatasi pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta adanya tumpang tindih program antar Organisasi Perangkat Daerah turut menghambat optimalisasi penggunaan anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal tersebut, diperlukan penerapan perencanaan anggaran berbasis output yang menitikberatkan pada capaian kinerja, penguatan kapasitas fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap temuan audit. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah sehingga mendukung optimalisasi program prioritas dan percepatan pembangunan di Kabupaten Flores Timur secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. R. B., & Wijayanti, D. (2023). Analisis kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Islam (JABIS)*, 8(1), 1–20.
- Alfatih, A., & Wahyudi, W. (2022). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Belanja Daerah di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 23-35.
- Annisa, C. (2015). *Analisis pengaruh ruang fiskal dan produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2001–2013*.
- Ariyanti, A. D. (2023). Kebijakan fiskal daerah dalam rangka pemerataan dan kemandirian pemerintahan daerah. *Setkab.go.id*.

- Bird, R. M., & Smart, M. (2002). Intergovernmental Fiscal Transfers: International Lessons for Developing Countries. *World Development*, 30(6), 899-912.
- Dinarjito, A., & Dharmazi, I. (2020). *Analisis pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi COVID-19*. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(2).
- Defis. (2017). Desentralisasi fiskal, ekonomi, dan keuangan daerah. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah*, 1, 1–20.
- FloresPos.net. (2024, September 8). Target PAD Flores Timur Tahun 2024 Hanya Rp 49 Miliar, Tersisa Tiga Bulan Baru Realisasi Rp 10 Miliar. Diakses dari <https://florespos.net/2024/09/08/target-pad-flores-timur-tahun-2024-hanya-rp-49-miliar-tersisa-tiga-bulan-baru-realisasi-rp-10-miliar/>
- FloresPos.net. (2025, April 29). APBD 2025 Babak-belur, Baru Empat Bulan Pemda Flotim Sudah Usul Mendahului Perubahan Rp 69 M Lebih. Diakses dari <https://florespos.net/2025/04/29/apbd-2025-babak-belur-baru-empat-bulan-pemda-flotim-sudah-usul-mendahului-perubahan-rp-69-m-lebih/>
- Kemenkeu. (2023). Kebijakan fiskal dan desentralisasi fiskal di Indonesia. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.
- Kelen, V. B. (2024). Analisis strategi pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan daerah. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 1(1), 1-15.
- Ma'ruf, M. R., & Andriansyah, E. H. (2022). *Kebijakan fiskal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi*. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3).
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. McGraw-Hill.
- MetroTVNews. (2024, Desember 15). 559 Kantor Pengelolaan Keuangan di Flores Timur Diaudit Massal. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/kpLCWnx0-559-kantor-pengelolaan-keuangan-di-flores-timur-diaudit-massal>
- MasarikuOnline. (2023, Agustus 21). Pemkab Flores Timur Tambahkan 66 Milyar Lebih Belanja Daerah, Eks Pegawai Non ASN Tertegun. Diakses dari <https://masarikuonline.com/pemkab-flores-timur-tambahkan-66-milyar-lebih-belanja-daerah-eks-pegawai-non-asn-tertegun/>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Pale, M. Y. (2022). Strategi kebijakan fiskal pemerintahan daerah Kabupaten Malang dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. *Rinjani: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63–67.
- Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2022). Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026. Diakses dari <https://florestimurkab.go.id/beranda/2022/04/05/rencana-pembangunan-daerah-kabupaten-flores-timur-tahun-2023-2026/>
- Putra, A. D., Mukhlis, I., & Utomo, S. H. (2017). *Analisis kebijakan fiskal ekspansif pada APBN di Indonesia perspektif ekonomi Islam*. *Jurnal FREAKONOMICS*, 1(1), 56–66.
- Retnoningrum, R. (2021). Peran Transfer Pusat ke Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(3), 112-125.
- Sevianti, S., Darmawati, D., Arkaan, A. B., & Yulianto, H. (2025). Tinjauan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2), 4196–4207.
- Sumardjoko, I. (2019). Penguatan kinerja keuangan daerah wilayah kepulauan dan implikasinya terhadap perubahan fundamental ekonomi regional. *Jurnal Defis*, 5, 1–15.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Tukan, M. G. A., & Suparyati, A. (2024). Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 4(1).

World Bank. (2001). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty* 73–85.